

# PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG

**Haedar**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: [latifhaedar777@gmail.com](mailto:latifhaedar777@gmail.com)

## **Abstrak**

*Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Ibu Herlina Sakawati dan Bapak Muhammad Guntur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang dianalisis melalui lima indikator prinsip pajak daerah yaitu, prinsip elastis, prinsip keadilan, prinsip kemudahan administrasi, prinsip keberterimaan politis, dan pajak nondistorsi terhadap perekonomian. pinrang tidak efektif, maka dari itu perlu dilakukan perbaikan demi terlaksananya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang*

**Kata kunci:** *Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Pinrang*

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari

bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk yang memanfaatkan konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah karena mendapat sesuatu manfaat, wajar jika mereka menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada hakikatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, Pajak Bumi dan Bangunan dikecualikan atau tidak dikenai PBB adalah bumi dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan secara pribadi salah satu contohnya yaitu seperti rumah sakit umum, tempat pendidikan (pesantren, SD SLTP, SLTA,PT) tanah wakaf, panti asuhan, tempat ibadah, tempat olahraga untuk umum, museum, yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang

---

<sup>1</sup>UUD 1945 pasal 33 ayat 3

pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi/tanah, yang memperoleh manfaat atas bumi/tanah, memiliki, menguasai atas bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

Pemerintah dalam hal pemungutan atas pajak bumi dan bangunan adalah asas keadilan terhadap penetapan nilai jual objek pajak, masyarakat atau biasa disebut juga wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai nilai jual objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak menghasilkan nilai yang cukup besar dan hal ini menyebabkan semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atas bumi dan bangunannya, karena besarnya tanggungan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ini mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan atas tanah

Pemerintah Kabupaten Pinrang sebaiknya mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar seluruh warganya yang menjadi wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang efektif hal ini dikarenakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Pinrang masih mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan selain itu kurangnya sosialisasi tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan manfaat dari hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Wajib Pajak diperlukan kesadarannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar Pembangunan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan cepat teralisasi dengan baik, dan paling tidak daerahpun dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan pendapatannya sendiri karna betapa pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam membangun daerah yang sangat potensial, jadi pemerintah memerlukan strategi dalam pemungutannya dilapangan

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang, dan menjadikan suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir dengan judul **“Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang”** permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang”** Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Pinrang

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Konsep Pengelolaan**

#### **1) Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

optimal.

#### **2) Fungsi Manajemen**

Fungsi pokok manajemen terdiri dari *planning, organizing, Actuating dan Controlling* yang biasa disingkat POAC dimana fungsi masing-masing saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dimana unsur-unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya. Terry dalam Mappaenre (2009) menyatakan fungsi manajemen yaitu: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) pengarahan (*actuating*), 4) pengawasan(*controlling*)<sup>2</sup>, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Perencanaan (*planning*)**

merupakan suatu proses, suatu fungsi dan suatu keputusan. Dikatakan sebagai suatu proses karena perencanaan itu merupakan suatu

---

2 Ahmad Mappaenre. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Penerbit UNM Hal 89

rangkaian kegiatan yang dimulai dengan tahap persiapan, penetapan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, penentuan alternatif, pengaturan sumber-sumber yang diperlukan.

#### 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur tersebut serta pemberian fasilitas sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### 3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan adalah aktivitas untuk mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan serta bergerak untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain *actuating* adalah suatu proses kegiatan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### 4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, mencocokkan serta membandingkan antara pelaksanaan kerja dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga mempermudah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan.

### **b. Konsep Pajak**

#### **1) Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adrian dalam Purwono (2014) menyatakan bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran

umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup>

Anderson dalam Saidi (2014) mengemukakan bahwa “pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.<sup>4</sup>

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu wajib pajak pusat dan wajib pajak daerah, pengelompokan itu dikarenakan terdapat perbedaan hak yang dimiliki oleh wajib pajak pusat dengan hak yang dimiliki oleh wajib pajak daerah. Perbedaan itu disebabkan karena ketentuan tentang pemenuhan hak antara wajib pajak pusat dengan wajib pajak daerah. Kewajiban wajib pajak, wajib pajak pusat ataupun wajib pajak daerah tidak bersifat final artinya setiap saat dan waktu wajib pajak dapat berubah. Hal ini dikarenakan kewajiban wajib pajak dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum pajak. Perubahan itu menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak kedepan untuk menunjang pembangunan dan pelaksanaan pemerintah negara menuju pada masyarakat adil dan makmur.

#### **2) Prinsip Pajak Daerah**

Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa ada lima Prinsip pajak daerah yaitu “1) prinsip elasitas, 2) prinsip keadilan 3) prinsip kemudahan administrasi 4)

---

3Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga, hal 7

4 Prof dr. Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaharuan hukum pajak*. Depok: Raja Grasindo persada, hal. 21-22

prinsip keberterimaan politis, 5) pajak nondistorsi terhadap perekonomian”<sup>5</sup> dengan uraian sebagai berikut:

1) Prinsip Elastis

pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak.

2) Prinsip keadilan

pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti adil berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perilaku hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada kebal pajak.

3) Prinsip kemudahan administrasi

administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan kemudahan dan fleksibilitas, bagi masyarakat dalam membayar pajak.

4) Prinsip keberterimaan politis

pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD atau melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak

daerah, bahkan jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

5) Pajak Nondistorsi terhadap perekonomian.

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

**3) Fungsi Pajak yakni *The Four “R”s***

Purwono (2010) menyatakan bahwa *The Four R* adalah istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu, “ 1) *Revenue* (penerimaan), 2) *Redistribution* (pemerataan), 3) *Repricing* (pengaturan Harga), 4) *Representation* (legalitas Pemerintah)”<sup>6</sup> dengan uraian sebagai berikut:

1) *Revenue* (penerimaan) Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, pajak menyumbang hampir 70% total pendapatan negara. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi serta pembiayaan lainnya.

2) *Redistribution* (pemerataan) Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di setiap negara sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

<sup>5</sup>Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta:

Erlangga, hal 21

<sup>6</sup>Purwono. Op. cit, hal. 8-10

- 3) *Repricing* (pengaturan Harga) Fungsi *repricing* yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- 4) *Representation* (legalitas pemerintahan) Pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh pengusaha tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen). Pemungutan pajak langsung (seperti pajak penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan pewujudan pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai.

#### c. Pajak Bumi dan Bangunan

##### 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan. Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa, "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan."<sup>7</sup> Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

##### 4. Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2011) menjelaskan pengelompokan pajak terdiri atas " 1) Pajak menurut golongannya, 2) Pajak menurut sifatnya, 3) Pajak menurut lembaga

pemungutnya<sup>8</sup> untuk lebih jelasnya, pendapat di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menurut golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pajak langsung adalah pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

- 2) Menurut sifatnya
  - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak, tariff pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut.

- 3) Menurut lembaga pemungutnya
  - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
  - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dari penjelasan diatas, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak

<sup>7</sup> Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan

<sup>8</sup> Prof Dr Mardiasmo Mba Ak. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta, hal. 15

yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara, contoh Pajak Penghasilan sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah contoh Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan dan nilai jual kena pajak (NJKP)**

Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai jual kena pajak (NJKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sebesar 40% dari NJOP untuk
  - a) Obyek pajak perkebunan
  - b) Obyek pajak kehutanan\obyek pajak pertambangan
  - c) Objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya apabila NJOP diatas 1 milyar
- 2) Sebesar 20% dari NJOP untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya apabila NJOP dibawah 1 milyar sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi mengenal besarnya NJKP.

## **3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5% sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 80 ayat 1 dan 2 adalah (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>9</sup>

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2000 pasal 2 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah Pasal 2 bahwa:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut :

- a) 10% untuk Pemerintah Pusat;
- b) 90% Daerah.

- 2) Jumlah 90% yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :

- a) 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan
- b) 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c) 9% untuk Biaya Pemungutan<sup>10</sup>

## **4. Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu pertama sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, yang kedua yaitu sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh pemerintah agar norma perpajakan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Ancaman kepada wajib pajak apabila pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi dua-duanya sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 1985 pasal 24 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 80

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000 pasal 2

dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP.
- 2) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 1985 pasal 25 bahwa wajib pajak yang terbukti karena kesengajaannya yang menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP.
- 2) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
- 3) Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.
- 4) Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang.

#### **d. Kerangka Konseptual**

Salah satu masalah dominan terjadi pada masa otonom ini yaitu bagaimana daerah mengoptimalkan sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program-program pemerintah dalam pembangunan di daerah. Salah satu sumber dana yang dapat membantu program-program pemerintah tersebut yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Berbagai macam pajak yang ada di daerah yang tentunya masing-masing memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, namun beberapa jenis pajak yang belum maksimal pengelolaannya. Misalnya saja pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pengelolaan pajak tersebut masih banyak mengalami kendala-kendala dalam pemungutannya. Upaya dalam meningkatkan penghasilan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan ini yaitu dengan melihat Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang dengan tingkat kepuasan yang diperoleh yaitu mutu pembangunan yang

merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat yang sangat penting dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah. Ada beberapa tahap-tahap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang yang dikemukakan oleh Mahmudi mulai dari prinsip elastis, keadilan, kemudahan administrasi, keberterimaan politis dan prinsip pajak nondistroksi terhadap perekonomian demi terciptanya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang yaitu prinsip elastis mencakup para wajib pajak tidak keberatan dalam naiknya jumlah pajak yang harus dibayar dengan adanya pemberitahuan dari pemerintah daerah sebelumnya. Prinsip keadilan mencakup adanya manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan seperti pembangunan daerah yang sudah merata perlu adanya pemerintah daerah menerapkan perilaku hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada kebal pajak, prinsip kemudahan administrasi mencakup pemerintah daerah melakukan perubahan atau perbaikan sistem administrasi pajak daerah sehingga adanya kesederhaan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, prinsip keberterimaan politis mencakup pemerintah melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. dan prinsip pajak nondistroksi terhadap perekonomian yaitu pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak yang buruk terhadap perekonomian dan pungutan yang menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah

Selanjutnya data yang diperoleh yaitu melalui metode wawancara terstruktur, pengamatan langsung (observasi), dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada Kepala Bidang Pendapatan daerah Kabupaten Pinrang, petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pinrang dan lima wajib Pajak di Kabupaten Pinrang sedangkan sumber data skunder diperoleh dari berbagai media seperti buku, jurnal, koran, buletin, undang-undang dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, menurut Miles, Huberman dalam Sugiyono (2017) dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, aktivitas dalam analisis data yaitu secara rinci dan sistematis serta terus-menerus yang mengikuti langkah-langkah kondensasi data (*Data Condensation*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) guna menjawab permasalahan penelitian.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, agar besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya, sama dengan kondisi yang ada dilapangan. Disini pemerintah agar memberikan rasa keadilan dalam penetapan nilai jual objek pajak supaya wajib pajak rutin membayarkan pajaknya sehingga masyarakat atau wajib pajak rela membayar sesuai dengan nilai pajak yang ditetapkan. setelah melakukan beberapa peninjauan secara ilmiah dilapangan tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang maka diperoleh informasi yang berkaitan sebagai berikut:

#### **a. Prinsip Elastis**

Dalam teori Mahmudi menjelaskan bahwa prinsip elastis yaitu pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis

artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat. Implikasi Prinsip Elastis ini terhadap pengelolaan pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan dalam membayar pajak.

Prinsip elastis di kabupaten pinrang yaitu perlu adanya komunikasi pemerintah daerah dengan wajib pajak tentang adanya pemberitahuan apabila pembayaran pajak mengalami peningkatan agar masyarakat mengetahui jika pembayaran pajak mengalami perubahan atau peningkatan, meski perubahan yang tidak terlalu signifikan tetapi wajib pajak perlu mengetahui hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy, yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dengan tujuan untuk memberitahukan, mengubah sikap, pendapat atau perilaku orang tersebut. Jadi menurut Onong Uchjana Effendy dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu secara langsung maupun tidak langsung agar proses penyampaian itu dapat tersampaikan dengan tujuan untuk memberitahukan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, para wajib pajak di kabupaten pinrang tidak keberatan apa bila tidak adanya pemberitahuan atau penyampaian dari pemerintah daerah apabila Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan dibanding beberapa tahun sebelumnya karna pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan dan pembayaran hanya dilakukan sekali dalam setahun, masyarakat juga mengetahui bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjadi kewajiban setiap tahunnya.

#### **b. Prinsip Keadilan**

Dalam teori Mahmudi menjelaskan bahwa prinsip keadilan yaitu pajak daerah harus memberikan keadilan, baik secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti adil berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak



daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan periklu hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada kebal pajak.

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti adil berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat dan penerapan perilaku hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada kebal pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Sidik bahwa Adil dan merata secara verikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

Pelanggaran jika wajib pajak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi berupa denda 2% dan sanksi pidana berupa penjara atau kurungan bahkan aset bisa disita oleh pemerintah daerah, wajib pajak yang ada di Kabupaten pinrang belum ada pelanggaran yang diberikan sanksi pidana. Pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran yang diberikan sanksi administrasi yang diberikan denda sebesar 2% per bulan.

Para wajib pajak sebagian besar belum merasakan manfaat dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan seperti pembangunan daerah dikarenakan pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang belum merata, pemerintah hanya memprioritaskan pembangunan dipusat kota, sementara kebutuhan masyarakat dipedesaan berupa jalanan yang berlubang kurang diperhatikan.

#### **c. Prinsip kemudahan Administrasi**

Dalam teori Mahmudi menjelaskan bahwa Prinsip kemudahan administrasi, pajak daerah harus fleksibel, sederhana mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan kemudahan dan fleksibilitas, bagi masyarakat dalam

membayar pajakPrinsip kemudahan administrasi mencakup pemerintah daerah melakukan perubahan atau perbaikan sistem administrasi pajak daerah sehingga adanya kesederhaan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Prinsip terhadap pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam sistem administrasi sehingga menjamin adanya kesederhanaan dan kemudahan masyarakat sehingga seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Jadi apabila seseorang percaya bahwa suatu teknologi itu mudah untuk digunakan maka orang tersebut akan menggunakannya. Sehingga variabel kemudahan ini memberikan indikasi bahwa suatu sistem dibuat bukan untuk mempersulit pemakainya, namun justru suatu sistem dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pemakainya. Seperti yang dikemukakan oleh Sidik bahwa Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana mudah dihitung, dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

Adanya sistem pemungutan Pajak Melalui Aplikasi atau pun melalu Bank yang telah melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak ada yang terlambat membayar pajak, malas, atau yang pergi merantau, dengan adanya pemungutan pajak melalui aplikasi dimana pun wajib pajak berada, pembayaran sudah dapat dilakukan. Proses pelayanan lebih efisien karna wajib pajak bisa melengkapi formulir maupun berkas-berkas yang dibutuhkan apa bila ingin membuat permohonan baru atau mengubah balik nama.

Jika pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui petugas pemungut pajak yang datang di setiap rumah, petugas pemungut pajak akan memasukkan nama wajib pajak ke dalam Daftar Penerima Harian Pajak Bumi dan Bangunan yang akan disetorkan ke tempat pembayaran sebagaimana yang ditentukan oleh Negara.

#### **d. Prinsip keberterimaan Politis**

Dalam teori Mahmudi menjelaskan bahwa Prinsip keberterimaan politis itu, pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh

masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD atau melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah bahkan jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak.

Pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang telah melakukan keterlibatan tokoh masyarakat dalam penentuan kebijakan pajak daerah, sehingga penyampaian tentang perubahan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan telah tersampaikan ke masyarakat lebih cepat sehingga kesadaran masyarakat di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil dari keterlibatan tokoh masyarakat dalam penentuan kebijakan Pajak daerah tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap wajib pajak di Kabupaten Pinrang seperti pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari hasil kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

#### **e. Pajak nondistorsi terhadap perekonomian.**

Pajak Bumi dan Bangunan tidak boleh menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian tetapi pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen, namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan pajak menimbulkan tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah. Hal ini dibenarkan oleh Sidik bahwa Non distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian tetapi pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban baik bagi konsumen maupun produsen, dan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai finansial yang untuk membayar

pajak, penerimaan pajak di kabupaten pinrang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 karena melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah daerah, penerimaan pembayaran yang diterima sebesar 105,12% dari target 100% tetapi realisasi tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 jadi kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan di Kabupaten Pinrang.

## **4. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, dapat ditarik kesimpulan yang sehubungan dengan permasalahan penelitian yaitu Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak efektif dapat dilihat dari lima indikator, prinsip elastis hal ini dibuktikan bahwa masyarakat tidak mendapatkan pemberitahuan apa bila pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan, prinsip keadilan wajib pajak sebagian besar belum merasakan manfaat dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, prinsip kemudahan administrasi hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah telah menyediakan pembayaran pajak melalui Bank atau aplikasi tetapi sebagian besar wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang datang disetiap tempat tinggalnya sehingga wajib pajak kurang kesadarannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, prinsip keberterimaan politis hal ini dilihat dari wajib pajak tidak mendapatkan sosialisasi tentang manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan prinsip nondistorsi terhadap perekonomian kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015

### **b. Implikasi**

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pinrang dapat mengetahui bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan saat ini sudah berjalan dengan baik dilihat dari realisasi yang diterima dari pungutan Pajak Bumi dan

Bangunan melebihi dari target yang ditentukan sebelumnya. Selain itu pemerintah daerah perlu adanya sosialisasi apa bila Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatann meski peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

### c. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan adanya pemberitahuan apa bila pajak mengalami peningkatan.
2. Para wajib pajak hendaknya bisa melakukan pembayaran pajak melalui Bank atau aplikasi yang telah di sediakan oleh pemerintah, masyarakat sebagai wajib pajak tidak perlu lagi menunggu petugas pajak untuk datang menagih pembayaran pajak disetiap rumah, agar proses pembayaran cepat terlaksana

## 5. REFERENSI

### Buku

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta
- Mappaenre. Ahmad. 2009 *dasar-dasar ilmu administrasi dan manajemen*. Makassar: Badan Penerbit UNM
- Mohammad Zain dan Suryo Hermana. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Pedoman penulisan skripsi FIS UNM
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*: PT Refika Aditama
- Saidi, Muhammad Djafar. 2014. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Depok: Raja Grasindo Persada
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Di Indonesia, keuangan, pajak dan Retribusi Daerah*. Depok : PT Rajagrafindo Persada

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. Ke-25*”, Bandung: Penerbit Alfabeta

Suharsaputra, Unhsar. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* PT Refika Aditama

Suratman. 2012 *Konflik dan Efektifitas Organisasi*: Yogyakarta Capiya Publishing

### Skripsi

Suryani, Evi. 2016. “Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dinas pendapatan kabupaten pesawaran dalam peningkatan pendapatan asli daerah (pad) (Studi pada Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Rahmayanti, Eka. 2015. “Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (studi Kasus pada kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Pare-pare)”: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

### Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bab 1 pasal 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 80 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Sumber Lain

Eddi Wahyudi H. 2014. *Pajak Bumi dan Bangunan* [www.eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb/](http://www.eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb/).

Pakar komunis. “35 pengertian komunikasi menurut para ahli.” 10 Juni 2018 <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-komunikasi-menurut-para-ahli>.